

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti, H. P. (2018). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Sikap*, 3(1), 277751.
- Irawati, W. (2015). Perpajakan (Bahan Ajar, Akuntansi S1).
- Kementrian, K. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.03/2012 Tentang Kriteria Jasa Penyedia Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- Kementrian, K. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2012 Tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- Kementrian, K. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- Kementrian, K. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pe.
- Pemerintah, R. I. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pemerintah, R. I. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah, R. I. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pemerintah, R. I. (2020). Surat Edaran Nomor SE-12/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembenahan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak Instansi Pemerintah/Bendahara.